

---

## Journal Paper Competition Accounting Festival 2026

---

### PERAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DALAM INKLUSI KEUANGAN DAN STABILITAS EKONOMI

**Annisa<sup>1</sup> Risqiyah<sup>2</sup> Risqi Laili Jihan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan  
[annisa6619@gmail.com](mailto:annisa6619@gmail.com)<sup>1</sup> [risqiyah089@gmail.com](mailto:risqiyah089@gmail.com)<sup>2</sup> [rizqilailijihan63@gmail.com](mailto:rizqilailijihan63@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### ARTICLE INFO

##### **Article history:**

*Received:*

*Received in revised form:*

*Accepted:*

**Keywords:** *Digital payment systems, financial inclusion, national economic stability.*

##### **Paper type**

Jenis artikel (artikel penelitian, telaah literatur)

#### ABSTRACT (in English)

The development of digital payment systems in Indonesia has grown rapidly, driven by technological advancements and increased digital financial service usage. These systems function not only as transaction tools but also as strategic instruments to promote financial inclusion and national economic stability. This study aims to analyze the role of digital payments in enhancing financial inclusion and their contribution to the national economy. Using a descriptive qualitative approach, data was gathered through literature studies of official reports from Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and relevant scientific journals. The results indicate that innovations such as electronic money and QRIS effectively expand financial access, increase transaction efficiency, and accelerate money circulation. These factors contribute positively to economic stability. However, rapid innovation introduces challenges, including data security risks and the need for rigorous oversight. Consequently, Bank Indonesia's role as a regulator is vital in ensuring the security, stability, and sustainability of the digital payment ecosystem to support long-term economic resilience.

**Design/methodology/approach** – Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta jurnal ilmiah terkait sistem pembayaran digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi untuk mengkaji peran sistem pembayaran digital terhadap inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan software khusus dan hanya memanfaatkannya untuk

pengolahan data dan referensi.

**Findings** - Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital berperan dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong perputaran uang dalam perekonomian. Selain itu, peran Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan ekosistem pembayaran digital.

**Originality/value** - Penelitian ini menawarkan pandangan baru dengan mengaitkan peran sistem pembayaran digital terhadap inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional secara bersama. Kajian ini memberikan nilai tambah berupa kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan bagi penguatan sistem pembayaran digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Dinamika sistem pembayaran di Indonesia saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar seiring dengan semakin dominannya peran teknologi finansial (fintech). Digitalisasi ekonomi bukan lagi sekadar fenomena sementara, melainkan realitas yang terekam jelas dalam statistik Bank Indonesia pada triwulan I 2025. Data tersebut mencatat pertumbuhan transaksi perbankan digital mencapai 17,12% (yoy), yang dibarengi dengan kenaikan penggunaan uang elektronik sebesar 31,8% (yoy). Akselerasi ini lahir dari sinergi berbagai elemen: kenyamanan platform digital, pola konsumsi masyarakat pascapandemi yang telah menetap, serta bauran kebijakan otoritas yang visioner. Alhasil, sistem pembayaran digital kini bertransformasi menjadi infrastruktur vital yang tidak hanya menjamin stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pemeratakan akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Pada level mikro, dampak positif digitalisasi terlihat sangat nyata bagi pelaku UMKM dan masyarakat akar rumput. Hingga awal tahun 2025, layanan pembayaran cepat seperti BL-FAST mencatatkan lonjakan nilai transaksi hingga 55,7% (yoy), sebuah angka yang menunjukkan betapa masifnya adopsi teknologi ini di sektor usaha kecil. Inovasi tersebut secara efektif menjadi gerbang pembuka bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh perbankan (unbanked) untuk mulai terintegrasi ke dalam ekosistem keuangan formal. Keberhasilan ini kian diperkokoh oleh digitalisasi penyaluran bantuan sosial (G2P) yang berjalan efektif, membuktikan bahwa teknologi mampu merangkul kelompok masyarakat rentan ke dalam jaringan ekonomi digital sekaligus mempercepat pencapaian inklusi keuangan nasional yang berkelanjutan. Dalam cakupan yang lebih luas, efisiensi dari digitalisasi ini turut memperkuat ketahanan ekonomi makro kita. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) telah membuahkan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, di mana penerimaan dan pengeluaran daerah menjadi jauh lebih optimal. Di sektor transportasi, digitalisasi tidak hanya memangkas berbagai inefisiensi di lapangan, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat sirkulasi ekonomi di masyarakat. Namun, di tengah kemajuan yang pesat tersebut, masih terdapat sejumlah ganjalan yang perlu segera diatasi. Bank Indonesia menggarisbawahi tiga tantangan krusial: adanya ketimpangan layanan digital antardaerah, sebaran infrastruktur teknologi yang masih terpusat dan belum merata hingga ke Indonesia Timur, serta variasi tingkat literasi digital di masyarakat. Selain itu, ancaman keamanan siber yang kian canggih dan tuntutan akan regulasi yang lebih adaptif menjadi tantangan mendesak bagi para pemangku kebijakan. Meskipun kajian mengenai digitalisasi sudah banyak dilakukan, studi yang secara spesifik menempatkan sistem pembayaran sebagai titik temu antara inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional masih tergolong minim. Analisis literatur menunjukkan fragmentasi kajian terkait digitalisasi pembayaran. Studi terdahulu cenderung terfokus pada satu aspek saja: ada yang membahas regulasi Bank Indonesia, ada yang mengkaji ekonomi digital secara umum, dan ada yang fokus pada teknologi spesifik seperti QRIS. Namun, belum ada yang mengintegrasikan ketiganya dalam analisis terpadu tentang bagaimana sistem pembayaran digital berfungsi sebagai infrastruktur penghubung antara inklusi mikro dan stabilitas makro. Kekosongan kajian inilah yang menjadi research gap yang hendak diisi oleh penelitian ini. Kontribusi utama penelitian ini hadir melalui analisis yang menggabungkan dua perspektif kebijakan ekonomi dalam menilai sistem pembayaran digital Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan pembahasan dampak sistem pembayaran terhadap inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi, Penelitian ini justru secara khusus mengkaji bagaimana sistem pembayaran digital dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara

bersamaan. Dengan mengacu pada data terkini dari Bank Indonesia serta mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti regulasi, infrastruktur, dan disparitas antardaerah, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi celah dalam kajian akademis, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi penyusunan kebijakan yang lebih terpadu dan berorientasi pada keadilan.

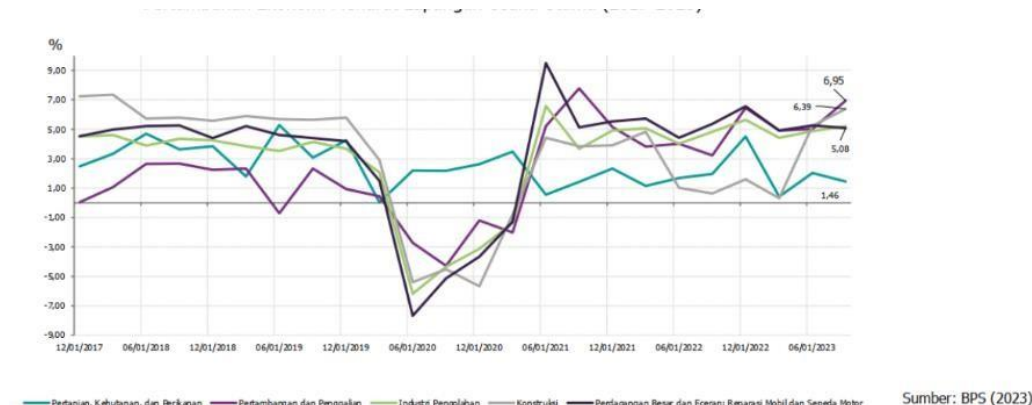
Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berupaya menjawab tiga pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana sistem pembayaran digital melalui instrumen seperti uang elektronik, QRIS, dan layanan cepat semacam BI-FAST dapat berperan secara simultan sebagai penggerak inklusi keuangan dan sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional di Indonesia; tantangan strategis apa saja yang muncul ketika sistem pembayaran digital difungsikan sebagai penghubung antara inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek regulasi, infrastruktur, keamanan siber, dan kesenjangan digital antardaerah; serta bagaimana peran dan strategi regulasi Bank Indonesia dapat diperkuat untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya berkembang secara inovatif, tetapi juga tetap berkelanjutan, inklusif, dan mampu berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional yang lebih tangguh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebaruan berupa kerangka analitis terpadu yang melihat sistem pembayaran digital sebagai infrastruktur penghubung (*bridging infrastructure*) antara dua pilar kebijakan ekonomi nasional: inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran sistem pembayaran digital sebagai penghubung strategis antara inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional, mengidentifikasi tantangan multidimensional dalam mengoptimalkan fungsi penghubung tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi Bank Indonesia, sehingga sistem pembayaran digital dapat terus berkembang secara inklusif, aman, berkelanjutan, dan tetap mendukung stabilitas ekonomi nasional.

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berpijak pada teori intermediasi keuangan dan konsep ekosistem ekonomi digital sebagai landasan utama dalam menganalisis peran sistem pembayaran. Sistem pembayaran digital tidak lagi dipandang hanya sebagai alat transmisi uang, melainkan sebagai infrastruktur vital (*bridging infrastructure*) yang menghubungkan inklusi keuangan di tingkat mikro dengan stabilitas ekonomi di tingkat makro. Dalam membedah permasalahan ini, penelitian melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif yang selama ini cenderung terfragmentasi dalam literatur terdahulu. Merujuk pada kajian hingga tahun 2023, studi mengenai sistem pembayaran seringkali terpisah antara fokus pada regulasi kebanksentralan (Astuti *et al.*, 2024), potensi ekonomi digital secara umum (Purba *et al.*, 2025), atau efektivitas satu instrumen spesifik seperti QRIS saja (Siregar *et al.*, 2025). Aspek regulasi memang menjadi fondasi utama keamanan transaksi, namun penelitian ini berargumen bahwa regulasi tersebut harus disinergikan dengan dinamika teknologi terbaru untuk menciptakan pengawasan yang adaptif. Kesenjangan (*gap*) dari penelitian tahun 2023 tersebut diisi dalam kajian ini dengan mengintegrasikan aspek regulasi, potensi ekonomi, dan inovasi teknologi ke dalam satu kerangka analitis terpadu, yang divalidasi dengan data statistik terbaru triwulan I 2025. Data Bank Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan transaksi perbankan digital sebesar 17,12% (yoy) dan lonjakan penggunaan uang elektronik hingga 31,8% (yoy), yang membuktikan bahwa integrasi ketiga aspek tersebut kini menjadi kebutuhan mendesak bagi

stabilitas nasional. Fokus utama materi ini adalah membuktikan bahwa sinergi antara kebijakan yang kuat dan inovasi teknologi seperti QRIS dan BI-FAST akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang memperluas akses masyarakat *unbanked* sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan pasar.



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Utama (2017-2023)

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran yang sistematis sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Dalam bagan tersebut, sistem pembayaran digital ditempatkan sebagai variabel utama (Variabel X) yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem keuangan. Inovasi teknologi berfungsi sebagai jembatan yang menurunkan hambatan masuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal, yang kemudian menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas (Mediator). Secara teoretis, keterhubungan inilah yang pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi nasional (Variabel Y) melalui efisiensi alokasi sumber daya dan mitigasi risiko transaksi secara *real-time*. Dengan demikian, Gambar 1 menegaskan bahwa stabilitas makro tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem pembayaran digital yang inklusif di tingkat mikro.

Meskipun digitalisasi menawarkan efisiensi besar, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa arus digitalisasi tanpa kendali berisiko mendistorsi peredaran uang dan mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah kompleksitas pengendalian atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (PUPT) di era digital. Kehadiran aset virtual seperti *stablecoin* yang bersifat anonim (*pseudonym*) berpotensi menciptakan transaksi yang tidak transparan, yang jika tidak dimitigasi, akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem keuangan nasional. Selain aspek keamanan transaksi, materi ini juga menelaah dimensi kedaulatan ekonomi dalam transformasi digital. Ketergantungan ekosistem *fintech* dan *e-commerce* pada pendanaan asing serta lonjakan impor barang konsumsi berbasis teknologi informasi menjadi sinyal waspada bagi neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu, kerangka analitis dalam penelitian ini memandang bahwa kebijakan seperti BSPI 2025 dan koordinasi antarlembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana tercermin dalam laporan triwulan I-2025, merupakan instrumen krusial untuk memastikan bahwa digitalisasi tetap berada pada jalur yang mendukung pertumbuhan domestik yang berkesinambungan tanpa mengorbankan stabilitas moneter (Pers *et al.*, 2025).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi dari laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), serta jurnal-jurnal ilmiah terkait (termasuk komparasi literatur periode 2023-2025). Analisis data diarahkan secara khusus untuk membedah pola kebijakan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap lima visi utama BSPI 2025, khususnya pada pilar *Open Banking* dan *Sistem Pembayaran Ritel*, guna memahami bagaimana Bank Indonesia mengintegrasikan ekonomi-keuangan digital secara *end-to-end*. Selain itu, analisis juga difokuskan pada implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Berdasarkan pedoman tata kelola (Bank Indonesia, 2021), SNAP diposisikan sebagai protokol standar yang menyeragamkan konektivitas antar-penyelenggara jasa pembayaran. Penelusuran pada dokumen SNAP dilakukan untuk memahami mekanisme *interlinkage* yang aman antara perbankan dan *fintech*. Tantangan transparansi di era digital bukan hanya soal aset virtual, tetapi juga integritas data pada tingkat operasional perbankan. Merujuk pada studi kasus penerapan program APU dan PPT (Wahidah, 2021), ditemukan bahwa kendala utama dalam pendeteksian transaksi mencurigakan adalah profil nasabah yang tidak lengkap serta sistem *core banking* yang belum mampu melakukan analisis otomatis, sehingga proses pemantauan masih dilakukan secara manual dan tidak efisien. Kesenjangan operasional ini memperkuat urgensi implementasi SNAP yang telah dibahas sebelumnya. Dengan adanya standarisasi data melalui SNAP, sistem perbankan dapat terintegrasi dengan ekosistem digital secara lebih presisi, memungkinkan identifikasi profil nasabah yang lebih akurat, dan mempercepat transisi dari pengawasan manual menuju pemantauan berbasis data digital yang *real-time*. Sinergi ini merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman tindak pidana pencucian uang sekaligus meningkatkan efisiensi nasional sebagaimana target dalam BSPI 2025. Kajian pada tingkat BPR ini menjadi representasi penting dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SNAP bukan hanya kebutuhan bank besar, melainkan fondasi bagi seluruh hierarki perbankan guna menjamin keamanan sistem pembayaran nasional.

Seluruh rangkaian analisis ini dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan keselarasan antara kerangka regulasi pusat dengan implementasi teknologi seperti QRIS dan BI-FAST di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjawab secara komprehensif bagaimana instrumen tersebut berfungsi sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional yang tangguh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Secara makro, perkembangan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi finansial, tetapi juga menunjukkan perubahan struktural dalam perilaku ekonomi masyarakat dan tata kelola sistem keuangan nasional. Data Bank Indonesia mencatat bahwa hingga triwulan I tahun 2025, nilai transaksi perbankan digital tumbuh sebesar 17,12% (year on year), sementara penggunaan uang elektronik meningkat signifikan hingga 31,8% (year on year). Tren ini menegaskan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi instrumen utama dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari dan mempercepat sirkulasi uang dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks inklusi keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital berperan strategis dalam memperluas akses layanan keuangan formal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tergolong unbanked dan underbanked. Instrumen seperti uang elektronik, QRIS, dan layanan BI-FAST telah menurunkan hambatan

geografis, administratif, dan biaya transaksi yang selama ini menjadi kendala utama dalam akses keuangan. Peningkatan signifikan transaksi QRIS pada sektor UMKM menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil dalam berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi formal. Dengan demikian, sistem pembayaran digital berfungsi sebagai jembatan (*bridging infrastructure*) antara aktivitas ekonomi mikro dan sistem keuangan nasional yang lebih luas.

Lebih lanjut, temuan penelitian mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, transparansi arus keuangan, dan optimalisasi kebijakan moneter. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), misalnya, terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, akselerasi layanan pembayaran cepat seperti BI-FAST yang mencatat pertumbuhan nilai transaksi sebesar 55,7% (*year on year*) memperlihatkan bagaimana sistem pembayaran digital mampu mempercepat perputaran uang tanpa meningkatkan risiko likuiditas secara berlebihan, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap berbagai tantangan struktural dan institusional yang menyertai pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital. Ketimpangan infrastruktur digital antardaerah, khususnya antara wilayah barat dan timur Indonesia, masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan manfaat inklusi keuangan. Selain itu, rendahnya literasi digital dan keuangan pada sebagian masyarakat berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem pembayaran digital, termasuk penipuan daring dan kebocoran data pribadi. Ancaman keamanan siber serta kompleksitas pengawasan terhadap Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (PUPT) juga menjadi isu krusial yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan apabila tidak dikelola secara adaptif dan terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian ini menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya memfokuskan analisis pada satu dimensi tertentu, seperti efektivitas QRIS terhadap UMKM, aspek regulasi sistem pembayaran, atau dampak ekonomi digital secara parsial. Studi-studi tersebut belum secara komprehensif mengaitkan peran sistem pembayaran digital sebagai penghubung simultan antara inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan mengintegrasikan data empiris terkini, kerangka regulasi Bank Indonesia, serta perspektif intermediasi keuangan, penelitian ini melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya yang masih bersifat terfragmentasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analitis terpadu yang menempatkan sistem pembayaran digital sebagai infrastruktur strategis dalam kebijakan ekonomi nasional. Penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik mengenai ekonomi digital dan sistem pembayaran, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran Bank Indonesia sebagai regulator, melalui kebijakan seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), menjadi kunci dalam memastikan bahwa inovasi sistem pembayaran digital tetap inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi digital global.

**Tabel 2. Perkembangan indikator sistem pembayaran digital di Indonesia**

1	Indikator Sistem Pembayaran Digital	Pertumbuhan (yoy)	Periode
	Transaksi Perbankan Digital	17,12%	Triwulan I 2025
	Penggunaan Uang Elektronik	31,8%	Triwulan I 2025
	Nilai Transaksi BI-FAST	55,7%	Triwulan I 2025

Sumber: Bank Indonesia data diolah 2025

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia berperan strategis sebagai infrastruktur penghubung antara inklusi keuangan pada tingkat mikro dan stabilitas ekonomi pada tingkat makro. Melalui instrumen seperti uang elektronik, QRIS, dan BI-FAST, sistem pembayaran digital terbukti mampu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat unbanked, meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi, serta mendorong perputaran uang yang lebih sehat dalam perekonomian nasional. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya berdampak operasional, tetapi juga memiliki kontribusi struktural terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian intermediasi keuangan dengan memperkenalkan perspektif sistem pembayaran digital sebagai bridging infrastructure yang mengintegrasikan tujuan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi secara simultan. Kerangka analitis terpadu yang diusulkan mampu menjembatani fragmentasi penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan aspek regulasi, teknologi, dan dampak ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat regulasi yang adaptif, memperluas pemerataan infrastruktur digital, serta meningkatkan keamanan siber dan literasi keuangan digital guna menjaga keberlanjutan ekosistem pembayaran digital.

Penelitian lanjutan dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris kuantitatif untuk mengukur besaran pengaruh sistem pembayaran digital terhadap indikator stabilitas ekonomi secara lebih spesifik, serta melalui studi komparatif antardaerah guna mengkaji disparitas inklusi digital. Selain itu, terbuka peluang pencetusan teori baru mengenai sistem pembayaran digital sebagai instrumen kebijakan makroprudensial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian risiko dan penguat ketahanan ekonomi nasional di era digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

Astuti, R.P. *et al.* (2024) '*Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia*', 02(01), pp. 130–140.

<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1159>

Indonesia, B. (2021) *Standar nasional open api pembayaran ( pedoman tata kelola )*. Edited by ASPI.

Indonesia, B. (2025) *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Laporan Nusantara*. Edited by Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Sektor dan Regional. Jakarta.

Pers, S. *et al.* (2025) '*Komite stabilitas sistem keuangan*', pp. 1–7.

Purba, D.S. *et al.* (2025) '*Analisis perkembangan ekonomi digital*', 10(204), pp. 126–139.

Qris, S. (2025) '*Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*', 3(2), pp. 1–7.

<https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>

Siregar, G.N., Hutagalung, M.I. and Nduru, M.P. (2025) '*Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Masa Depan Transaksi Keuangan (Studi pada QRIS)*', <https://doi.org/10.65510/jieb.v3i2.111>

*Ilmu Ekonomi dan Bisnis* [Preprint].

Wahidah, N.A. (2021) '*penerapan program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme (apu dan ppt) berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia*'. <http://dspace.uui.ac.id/123456789/43846>